

PENGEMBANGAN *SENSE OF SOCIAL CRISIS*
DI KALANGAN PESERTA DIDIK

Oleh : Anik Ghufro¹

Pendahuluan

Konsep *what knowledge is of most worth* yang ditawarkan Hebert Spencer dalam mengembangkan isi kurikulum memiliki dampak yang begitu dahsyat hingga sekarang. Setidaknya, dengan konsep tersebut pihak sekolah diharapkan mampu menyiapkan lulusannya menguasai sejumlah ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dan berarti bagi kehidupan kelak. Kurikulum 1994 yang disempurnakan dengan pendekatan *broad based curriculum* bisa dikategorikan sebagai model kurikulum yang mendasarkan konsep tersebut di atas.

Walaupun konsep di atas sangat memberi kontribusi terhadap proses penyiapan SDM handal dalam menguasai ilmu pengetahuan di berbagai disiplin ilmu, namun hal ini bukan berarti bahwa konsep tersebut merupakan segala-galanya dalam proses penentuan isi kurikulum. Kurikulum yang mendasarkan konsep tersebut ternyata tak mampu mengatasi berbagai masalah yang terjadi di masyarakat. Bahkan kurikulum tersebut banyak mengalami kegagalan dalam implementasinya.

Misalnya, praktik-praktik kependidikan di sekolah cenderung mengabaikan eksistensi anak didik dan peranannya sebagai bagian dari masyarakat. Apa yang diajarkan di sekolah semata-mata diarahkan pada upaya

¹ Dosen Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

pengembangan inteligensi anak (Robert Hutchins, 1936). Oleh karena itu, tidaklah berlebihan manakala proses pembelajaran di sekolah cenderung menekan *transfer of knowledge* daripada memperhatikan fungsinya sebagai *agent of social change*.

Tulisan ini menengahkan salah satu alternatif pengembangan rasa kepekaan terhadap krisis sosial (*sense of social crisis*) di kalangan siswa. Tulisan ini menarik untuk didiskusikan lebih lanjut dalam rangka mencari solusi terbaik atas berbagai gejala ketidakmampuan pihak sekolah menyiapkan lulusannya menjadi warga negara yang tanggap dan mampu membangun masyarakatnya.

Pengembangan *Sense of Social Crisis*

Kurangnya pertimbangan aspek kepekaan terhadap berbagai masalah sosial (*sense of social crisis*) bukan saja melanda pada isi kurikulum, namun juga sudah merambat pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Misalnya, pelanggaran HAM, ketidakadilan sosial, eksploitasi kekayaan sumberdaya alam, dan lain-lain. Institusi sekolah terasing dengan lingkungannya. Sekolah-olah antara pihak sekolah dengan masyarakat berjalan sendiri-sendiri tanpa ada hubungan yang bersifat *mutual symbiosis*.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, salah satu cara yang bias ditempuh adalah mengembangkan rasa peka peserta didik terhadap problem sosial dalam bentuk kurikulum rekonstruksi sosial ke dalam sistem pendidikan nasional kita. Alasan-alasan perlunya menerapkan model kurikulum ini, yaitu (1) kurikulum rekonstruksi sosial menempatkan problem dan isu-isu sosial sebagai materi kurikulum substansial yang harus dipelajari anak, (2) model kurikulum ini berpusat pada kebutuhan masyarakat daripada disiplin ilmu, di mana disiplin ilmu hanya dipakai sebagai acuan tatkala mempelajari masalah-masalah sosial yang

terkait, (3) mengedepankan dimensi proses dari pada hasil pembelajaran, dengan menggunakan prinsip *learn how to learn*.

Kurikulum ini bersumber dari aliran pendidikan interaksional, di mana antara pihak sekolah dengan masyarakat perlu melakukan kerja sama dalam mendidik anak. Dengan interaksi ini diharapkan siswa memperoleh kesempatan yang optimal dalam memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Sekolah bukan saja dapat membantu individu mengembangkan kemampuan sosialnya saja, tetapi juga dapat membantu bagaimana berpartisipasi sebaik-baiknya dalam kegiatan social.

Studi yang dilakukan Paulo Freire menunjukkan bahwa model kurikulum ini sangat efektif dalam membantu pengembangan daerah-daerah di Amerika Latin. Dengan menggalakkan *budaya akal budi (conscientization)*, ia mampu memerangi kebodohan dan keterbelakangan yang dialami masyarakat, dengan cara memberi kesempatan untuk memahami berbagai fakta dan masalah yang dihadapi menurut konteksnya.

Sesungguhnya, jika model kurikulum ini diterapkan dalam sistem pendidikan nasional kita sangatlah tepat, baik ditinjau dari agenda kebijakan pendidikan nasional, kecenderungan tuntutan kehidupan sosial budaya, maupun dari misi bangsa secara makro sebagaimana yang tercantum dalam GBHN 1999. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan kedudukan sekolah sebagai bagian dari sistem masyarakat secara totalitas.

Ditinjau dari arah pendidikan nasional, yang antara lain hendak mengembangkan mutu SDM sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh supaya generasi muda dapat berkembang secara optimal, maka model kurikulum ini dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai target tersebut. Dengan memberikan berbagai kesempatan dan mengajak anak didik terlibat secara aktif

dalam mencari solusi terbaik atas berbagai masalah yang muncul di lingkungan masyarakatnya, dimungkinkan rasa kepekaan (*sense of responsibility*) dan rasa memiliki (*sense of belongingness*) anak didik terhadap masyarakat lingkungannya akan tumbuh dan berkembang. Anak bukannya menjadi generasi yang terasing dari lingkungannya, namun sebaliknya, akan menjadi generasi penerus terhadap cita-cita dari masyarakatnya.

Ditinjau dari kecenderungan masyarakat kita yang ingin menerapkan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari, model kurikulum ini sangat memungkinkan dan cocok diterapkan pada masyarakat yang demokratis karena model kurikulum ini sangat menekankan partisipasi aktif dari setiap warga sekolah dengan berbagai pihak di masyarakat dalam upaya memecahkan berbagai masalah. Konsekuensinya, sekolah bukan saja membantu mengembangkan kemampuan sosial anak, tetapi juga dapat membantu bagaimana berpartisipasi sebaik-baiknya dalam kegiatan sosial (Nana Syaodih Sukmadinata, 1988).

Ditinjau dari misi bangsa Indonesia, antara lain ingin mewujudkan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi, penerapan model kurikulum ini sangat relevan. Dengan memberikan materi yang bersifat tematik, anak didik memiliki wawasan keilmuan yang komprehensif. Anak diminta memecahkan suatu masalah dengan cara lintas disiplin ilmu.

Hal-hal apa yang sajakah yang perlu diperhatikan jika model kurikulum ini benar-benar diterapkan dalam sistem pendidikan nasional kita ? Setidaknya, ada tiga hal yang perlu diperhatikan manakala model ini diterapkan dalam sisdiknas. *Pertama*, kesiapan dari pihak Depdiknas dalam proses perancangan kurikulum, baik yang menyangkut komponen substansial maupun teknik. Ini dimaksudkan bahwa pihak Depdiknas perlu melakukan uji coba dan

pengembangan desain kurikulumnya, sebelum diimplementasikan di sekolah. Selama ini ada implementasi sebuah kurikulum baru terkesan dipaksakan, yang hanya mendasarkan pertimbangan teoritik dan tanpa terlebih dahulu melakukan ujicoba.

Kedua, perdiapan pihak guru dalam mengimplementasikan kurikulum baru. Hal ini sangat perlu mendapat perhatian, mengingat guru adalah pihak terdepan dalam mewujudkan kurikulum kepada anak di kelas. Pengabaian terhadap faktor ini dapat menyebabkan implementasi kurikulum mengalami kegagalan. Oleh karena itu, saya sangat mendukung jika ada upaya penyempurnaan atau penyesuaian kurikulum perlu diikuti dengan perbaikan mutu kemampuan guru dalam implementasi kurikulum.

Banyak guru yang mengeluh manakala terjadi adanya pemberlakuan kurikulum baru. Guru seolah-olah merasa dipaksa untuk mengimplementasikan kurikulum tanpa terlebih dahulu mengerti apa sebenarnya yang diimplementasikan itu. Bahkan pada masa lalu, dijumpai ada sejumlah guru yang tidak mengerti kalau kurikulum yang sedang diimplementasikan itu telah diganti atau dirubah beberapa yang lalu.

Ketiga, kesiapan fasilitas pendukung, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan buku sumber dan pendukung. Model kurikulum ini berintikan problem dan isu-isu sosial yang dikemas dalam bentuk pembelajaran tematik, yang sangat berbeda dengan kurikulum yang pada saat ini sedang berjalan. Oleh karena itu, model kurikulum rekonstruksi sosial ini diterapkan jelas mempersyaratkan adanya perombakan struktur materinya, baik skopa maupun sekuensinya.

Penutup

Sebagai penutup, penulis ingin menegaskan kembali bahwa praktik-praktik kependidikan yang semata-mata berorientasi pada pengembangan dimensi intelegensi, ternyata gagal dalam menyiapkan SDM yang mampu mengatasi berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat kita. Untuk mengatasi kegagalan ini, sisdiknas kita perlu menerapkan model kurikulum rekonstruksi sosial, yang menekankan problem dan isu-isu sosial sebagai materi kurikulum.

Memang, model kurikulum ini bukanlah segala-galanya yang bias menjadikan anak didik menjadi warga masyarakat yang tanggap dan peka terhadap berbagai masalah yang terjadi di masyarakat, namun jika model kurikulum ini diimplementasikan dengan sungguh-sungguh, saya yakin persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keterasingan anak dengan masyarakat lingkungannya, sekolah gagal memainkan perannya sebagai agent of social change, akan dapat diminimalkan. Mudah-mudahan catatan ini bermanfaat guna meningkatkan sisdiknas yang semakin bermutu.

Daftar Pustaka

- Hutchins, Robert. 1936. *The Higher Learning in America*. New Haven : Yale University Press.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 1988. *Prinsip dan Landasan Pengembangan Kurikulum*, Jakarta: P2LPTK-Ditjen Dikti Depdiknas.
- Longstreet, Wilma S. dan Share Harold G., 1993. *Curriculum for a New Millennium*. Needham Heights: Allyn & Bacon.
- Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999*.